

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemberian bantuan luar negeri ini bukan merupakan hal yang baru dalam hubungan internasional. Praktik ini bahkan telah dimulai pasca usainya perang dunia 2 dengan tujuan membantu negara yang terdampak oleh perang. Saat ini, hampir seluruh negara di dunia terlibat dalam bantuan pembangunan baik sebagai negara pemberi bantuan, penerima bantuan, ataupun keduanya. Pada awalnya, arus dana bantuan identik dengan bantuan yang berasal dari negara-negara maju (*global north*) kepada negara berkembang (*global south*). Namun, dalam perkembangannya negara-negara berkembang juga mulai memainkan peran sebagai negara pemberi bantuan. Negara-negara ini kemudian disebut sebagai *emerging donors*, salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia sebenarnya sudah cukup lama terlibat dalam kerjasama pembangunan internasional, khususnya kerjasama antar negara berkembang. Hal ini bisa dilihat dari peran Indonesia sebagai inisiator Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang dilaksanakan di Bandung. Pada mulanya, Indonesia adalah negara yang menerima banyak bantuan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Australia. Namun seiring perkembangan dan pertumbuhan ekonominya, peran Indonesia mulai mengalami pergeseran dari negara yang semula menerima bantuan menjadi negara yang memberikan bantuan (Pribadi, 2021; Abdurachman & Prakoso, 2017).

Dalam memberikan bantuannya, salah satu kawasan yang menjadi perhatian bagi Indonesia adalah kawasan Pasifik. Pada mulanya, Indonesia masih belum terlalu memperhatikan kawasan ini dan menganggapnya sebagai 'backyard'. Meningkatnya perhatian kepada kawasan Pasifik berkaitan dengan "*look east policy*" yang mengarahkan kebijakan Indonesia ke arah Timur. Salah satu bentuk implementasinya adalah program '*Pacific Elevation*' yang merupakan penyempurnaan dari program *Pacific Engagement* yang telah dicanangkan pada tahun 2019 (Kemlu, 2021). Program ini bertujuan agar meningkatnya hubungan Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik khususnya pada bidang ekonomi. Retno Marsudi mengatakan bahwa *Pacific elevation* bukan hanya membicarakan peningkatan keterlibatan Indonesia di Pasifik, namun juga kerjasama sebagai bagian dari Pasifik untuk meningkatkan kemakmuran bersama (Kemlu, 2022).

Kawasan Pasifik, sebagai salah satu pasar non tradisional bagi Indonesia merupakan kawasan yang terdiri dari negara kepulauan yang berukuran relatif kecil. Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia di bagian Timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesamaan kultur dengan negara di kawasan pasifik, yaitu Suku Melanesia. Dalam kaitannya dengan politik luar negeri, Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Namun, terdapat suatu isu yang sempat membuat hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik mengalami kerenggangan, yang disebabkan oleh isu separatisme Papua. Negara-negara Pasifik yang notabeneanya memiliki kesamaan suku dengan orang-orang di Papua menunjukkan sikap dukungan dan solidaritas terhadap pemisahan Papua dari NKRI.

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia tentunya tidak tinggal diam. Indonesia kemudian melakukan cara-cara untuk dapat meredam dukungan terhadap kelompok separatis Papua, salah satunya adalah dengan cara memberi bantuan luar negeri. Indonesia kerap memberikan dana bantuan luar negerinya ke negara-negara di kawasan Pasifik seperti ke Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk bantuan, mulai dari bantuan teknis, dana hibah, hingga bantuan kemanusiaan. Pemberian bantuan negeri yang diberikan Indonesia ini ternyata membuahkan hasil yang positif, yakni dengan berkurangnya dukungan negara-negara Pasifik terhadap gerakan separatisme yang ada di Papua (Aryani dan Hapsari, 2021).

Sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk berperan sebagai negara donor, kemudian dibentuk lembaga dana kerjasama pembangunan internasional atau LDKPI. Dalam distribusi pemberian bantuan luar negeri Indonesia melalui LDKPI pada tahun 2020, Fiji menempati urutan pertama sebagai negara yang menerima bantuan dengan jumlah paling besar dari Indonesia yaitu sebanyak Rp.23.66 Miliar (LDKPI, 2020). Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan dua negara penerima dana lainnya yaitu Kepulauan Solomon dan Timor Leste yang hanya menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp.2.88 Miliar. Hal ini kemudian menjadi menarik meneliti, melihat bagaimana Fiji mendapatkan dana bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan dua negara lainnya di dalam satu periode yang sama serta apa motivasi Indonesia dalam memberikan bantuan ini.

Di kawasan Pasifik, Fiji adalah negara yang memiliki hubungan baik dan cukup dekat dengan Indonesia. Fiji merupakan negara pertama di kawasan Pasifik yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Selain itu, Fiji juga terlibat dalam

membantu Indonesia dalam mendapatkan status keanggotaan pada organisasi regional ras melanesia yaitu Melanesian Spearhead Group atau MSG. Hubungan ekonomi antar kedua negara juga menunjukkan kedekatan, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang menjadi partner dagang terbesar bagi Indonesia di kawasan pasifik. Sepanjang sejarahnya, jumlah volume perdagangan dengan Fiji selalu menempati urutan kedua setelah Papua Nugini di kawasan Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa Fiji merupakan partner dagang yang penting bagi Indonesia di kawasan. Maka dari itu, penulis melihat adanya potensi bahwa selain motif politik, pemberian bantuan negeri Indonesia ke Fiji juga dimotivasi oleh motif-motif ekonomi.

Penelitian ini menggunakan bahan rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Tulisan milik Gideon (2021), Bramasta & Nuryananda (2021), dan Aryani & Hapsari (2021) memiliki pendekatan yang berbeda namun sama-sama menjelaskan bagaimana Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke negara-negara Pasifik sebagai bentuk strategi untuk meredam kritikan dan dukungan terhadap separatisme di Papua. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian bantuan efektif untuk meredam dukungan dari negara kawasan Pasifik terhadap kemerdekaan Papua.

Sedangkan, tulisan milik Antara (2016) dan Arius (2020) menganalisa motif dibalik pemberian bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji. Kedua penelitian menarik kesimpulan bahwa pemberian bantuan dilandasi oleh motif politik, yaitu menjadikan Fiji sebagai hub untuk mendapatkan akses ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan dukungan internasional dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat. Selain

itu, hal ini juga didasari alasan bahwa Fiji merupakan negara Pasifik yang turut terlibat dalam membantu upaya Indonesia untuk meredam pergerakan kemerdekaan papua barat melalui organisasi MSG.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu meneliti terkait dengan bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji. Penelitian tersebut juga memiliki kesamaan yaitu berfokus pada isu politik, yang menggambarkan bagaimana pemberian bantuan luar negeri dilakukan oleh Indonesia utamanya sebagai upaya untuk meredam dukungan terhadap kelompok separatis di Papua. Sedangkan tulisan ini akan menawarkan sudut pandang baru dimana penelitian akan berfokus untuk menganalisis motif ekonomi Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Fiji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengangkat judul **“Tidak ada Makan Siang yang Gratis: Motif Ekonomi Bantuan Luar Negeri Indonesia Kepada Fiji Melalui Indonesia AID Pada Tahun 2020”** sebagai penelitian skripsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pertanyaan penelitian ini adalah *“Apa motif ekonomi dari bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia kepada Fiji melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) pada tahun 2020?”*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan motif ekonomi Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Fiji pada tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional, khususnya kajian yang terkait dengan bantuan luar negeri yang berasal dari *emerging donor*.

### **b. Manfaat Praktis**

Memberikan wawasan mengenai motif bantuan luar negeri Indonesia serta terkait dengan LDKPI sebagai badan bantuan luar negeri Indonesia.

## **1.5 Kerangka Teori**

Untuk menganalisis motif ekonomi dari bantuan luar negeri Indonesia kepada Fiji, tulisan ini menggunakan beberapa teori dan juga konsep. Teori dan konsep yang digunakan antara lain paradigma liberalism, konsep bantuan luar negeri, dan teori motif bantuan luar negeri dari sudut pandang liberalisme.

### **1.5.1 Paradigma Liberalisme**

Dalam ranah studi hubungan internasional, pengaruh liberalisme muncul sejak berakhirnya perang dunia 1. Menurut liberalis, aktor internasional bukan negara, melainkan individu dan kelompok. Negara bukan identitas tunggal (*unitary*), tetapi representasi dari kumpulan individu. Individu dan kelompok-kelompok masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan negara. Jadi, negara bukan aktor karena yang menjalankan negara adalah sekumpulan individu tadi (Rosyidin, 2020). Dalam memandang sifat manusia, kaum liberal memiliki pandangan dasar yang positif. Pandangan inilah yang kemudian turut dibawa pada optimisme dalam menjalankan urusan internasional

negara yang juga dijalankan oleh manusia. Sama halnya dengan realis, liberal tidak menafikan bahwa individu cenderung *selfish* atau mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan juga memiliki sifat yang kompetitif. Yang membedakan liberal dengan realis adalah bahwa kaum liberalis percaya bahwa individu juga memiliki kesamaan kepentingan. Hal inilah yang kemudian mendorong individu untuk terlibat dalam kolaborasi satu sama lainnya untuk mencapai kepentingannya masing-masing (Jackson & Sørensen, 2013, 100).

Liberalisme mengadopsi pendekatan bottom-up dan inside looking out karena yakin bahwa politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Oleh karena itu, liberalisme menekankan pada pentingnya faktor domestik (*domestic centric*) dalam menjelaskan hubungan antar negara. Hakikat kepentingan internasional adalah kepentingan individu dan aktor-aktor domestik. Tidak ada yang namanya kepentingan nasional, tetapi yang ada adalah kepentingan domestik karena apa yang menjadi tujuan negara pada akhirnya hanya merepresentasikan kepentingan aktor-aktor tadi. Menurut Andrew Moravcsik, negara berfungsi sebagai sabuk transmisi (*transmission belt*) yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan aktor domestik. Dengan demikian, negara hanyalah alat kepentingan bagi kelompok tertentu saja. Mereka menggunakan negara karena hanya dengan melalui negara kepentingan mereka dapat tercapai secara lebih efisien dan efektif (Moravcsik, 2001).

Dalam melihat struktur internasional liberalis memiliki pandangan yang cukup optimis dimana negara-negara berinteraksi dengan mengedepankan kerjasama dibandingkan konflik. Bagi liberalis, konflik adalah sesuatu yang

buruk. Negara-negara saling bekerjasama dan bertujuan untuk memenuhi tujuan mereka masing-masing. Dengan kata lain, kerjasama bukanlah cermin altruisme negara, melainkan semata-mata sebagai alat untuk mencapai kepentingan. Bagi liberalis, kerjasama akan menciptakan hubungan yang menang-menang (*non-zero sum game*). Masing-masing pihak merasa puas dengan bagiannya masing masing (*absolute gain*).

### **1.5.2 Konsep Bantuan Luar Negeri**

Fenomena pemberian bantuan luar negeri atau *foreign aid* bukan merupakan suatu isu baru dalam studi hubungan internasional. Dalam diskursus terkait *foreign aid* atau bantuan luar negeri, fokus analisis ditempatkan pada interaksi atau hubungan antara dua aktor utama, yaitu donor dan juga resipien. Aktor donor dalam diskursus bantuan luar negeri yang dimaksud tersebut adalah negara maupun organisasi internasional. Bantuan luar negeri kemudian dipandang sebagai sebuah strategi atau upaya untuk memaksimalkan upaya masing-masing aktor dalam mencapai kepentingannya (Virgianita et al., 2014).

Ditinjau dari sejarahnya, bentuk paling awal dalam fenomena pemberian bantuan luar negeri adalah bantuan militer. Berakhirnya perang dunia 2 merupakan titik awal dimulainya bantuan ekonomi, yaitu dengan dicetuskannya Marshall Plan oleh Amerika Serikat yang merupakan bentuk bantuan untuk rehabilitasi negara-negara Eropa Barat dan Selatan. Setelah bantuan ini dianggap berhasil, kemudian muncul sebuah komitmen bersama yang ditujukan untuk negara-negara dunia ketiga saat itu yang dikenal dengan Colombo Plan. hal ini menandakan adanya pergeseran konsentrasi kawasan untuk bantuan luar negeri

saat itu, dari Eropa Barat ke negara-negara Asia dan juga Amerika Latin (Hunt, 2012). Sejak saat itu implementasi bantuan luar negeri terus mengalami peningkatan dan perluasan isu sehingga menempatkan bantuan luar negeri sebagai salah satu isu yang signifikan dalam kajian hubungan internasional.

Dalam membahas fenomena bantuan luar negeri, seringkali ditemui tumpang tindih dan perbedaan dalam usaha untuk sekedar mendefinisikannya. Bantuan luar negeri kerap diartikan sebagai istilah halus untuk menyebut utang luar negeri, walaupun penyamaan seperti itu sama sekali tidak tepat. Bantuan luar negeri bukan utang dalam arti sempit, karena tidak semua bantuan luar negeri diberikan dalam bentuk utang luar negeri (Rosyidin, 2022).

Robert Gilpin (1987) mendefinisikan bantuan luar negeri secara sempit yaitu sebagai “sejumlah dana yang diberikan dari negara yang relatif kaya atau maju kepada negara berkembang”. Senada dengan definisi ini, K.J Holsti (1995) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai “pemberian uang atau dana, transfer teknologi dan juga bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima”. Sedangkan, Riddell (2007) berpendapat bahwa “bantuan luar negeri terdiri dari semua sumber daya, termasuk barang, keterampilan dan pengetahuan teknis, dana hibah (hadiah), atau pinjaman yang ditransfer oleh donor ke penerima”.

Carol Lancaster menawarkan definisi yang lebih komprehensif, yaitu “bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya pemerintah secara sukarela dari satu pemerintah kepada pemerintah lain, organisasi internasional, atau organisasi non-pemerintah (termasuk organisasi nirlaba yang bekerja dalam isu-isu tertentu, organisasi masyarakat, gereja dan organisasi sejenisnya, universitas, yayasan,

bahkan perusahaan yang berorientasi bisnis) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara penerima, di antara tujuan-tujuan lainnya”. Bantuan ini dapat berupa hibah tunai, pinjaman lunak, penghapusan atau keringanan utang, atau dalam bentuk komoditas seperti makanan atau obat-obatan. Bantuan ini dapat mendanai proyek-proyek terpisah, seperti pembangunan jalan, membiayai penelitian, bantuan teknis dan pelatihan bagi individu di negara penerima, atau dapat diberikan sebagai insentif bagi penerima untuk mengadopsi kebijakan yang dikehendaki oleh donor (Van Dusen & Lancaster, 2005).

Dalam tulisannya yang berjudul ‘*A Political Theory of Foreign Aid*’, Hans Morgenthau (1962) mengklasifikasikan enam jenis bantuan luar negeri, yaitu bantuan kemanusiaan, bantuan subsidi, bantuan militer, suap, bantuan untuk prestise, dan bantuan untuk pembangunan ekonomi. Dari keenam jenis bantuan tersebut, hanya bantuan kemanusiaan yang bersifat non-politis. Bantuan kemanusiaan ini ditujukan kepada negara yang dilanda bencana alam, seperti gempa bumi, kelaparan, hingga negara yang terjangkit suatu wabah. Walaupun bersifat non politis, bantuan kemanusiaan dapat memiliki fungsi politik ketika berada dalam konteks politik. Menurut Rosyidin (2022), Klasifikasi bantuan luar negeri yang ditawarkan oleh Morgenthau tersebut terlalu eksklusif karena hanya menekankan tujuan negara donor pada aspek politik. Padahal, pada kenyataannya terdapat banyak sekali tujuan dari bantuan luar negeri yang sifatnya non-politis.

Dalam diskursus bantuan luar negeri, terdapat tiga jenis bantuan yang paling umum, antara lain *Official Development Assistance* (ODA), *Official Assistance* (OA), dan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Klasifikasi

ini didasarkan pada empat aspek yakni pihak pemberi bantuan (donor), pihak penerima bantuan (recipient), tujuan bantuan, dan dimensi kehidupan yang melatarbelakanginya (Rosyidin, 2022). OECD mendefinisikan ODA sebagai bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (OECD, n.d.). Dalam pemberian bantuan, ODA berfokus pada bidang yang menunjang pembangunan negara, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan pengangguran, membangun infrastruktur, dan mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*). ODA juga tidak mengalokasikan dana bantuan untuk bidang-bidang di luar pembangunan seperti bantuan dalam bidang militer, pemeliharaan perdamaian, energi nuklir, dan program-program kebudayaan (OECD, n.d.).

Distribusi bantuan luar negeri dapat diberikan melalui dua jalur, yaitu secara bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan luar negeri yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Sedangkan bantuan multilateral adalah bentuk bantuan yang menempatkan lembaga bantuan internasional sebagai hub antar negara donor dengan penerima. Contoh bantuan bilateral adalah bantuan yang secara umum diberikan negara melalui lembaga bantuan luar negeri suatu negara, seperti USAID (Amerika Serikat), AusAid (Australia), JICA (Jepang), SIDA (Swedia), dan lain sebagainya. Sedangkan, bantuan multilateral diberikan melalui lembaga penyalur bantuan yang berperan sebagai perantara seperti Asian Development Bank (ADB) dan PBB.

Berdasarkan sifat bantuannya, bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi dua, yaitu bantuan terikat (*tied aid*) dan bantuan tidak terikat (*untied aid*). Bantuan terikat digambarkan sebagai hibah atau pinjaman resmi yang membatasi pengadaan untuk perusahaan di negara donor atau di sekelompok kecil negara. Sedangkan, bantuan tidak terikat tidak memiliki hambatan hukum dan juga peraturan untuk tujuan pengadaan yang dananya berasal dari dana bantuan. Secara umum, bantuan jenis ini lebih mampu meningkatkan efektivitas bantuan dengan mengurangi biaya transaksi serta meningkatkan kemampuan negara penerima untuk menentukan jalan mereka sendiri. Bantuan ini juga memungkinkan pemberi bantuan untuk lebih cermat dalam menyelaraskan program bantuan mereka dengan tujuan dan sistem manajemen keuangan negara penerima (OECD, n.d.).

### **1.5.3 Motif Alokasi Bantuan Luar Negeri**

Dalam kajian bantuan luar negeri, analisis terkait motif dan kepentingan donor dalam kebijakan distribusi bantuan merupakan kajian yang dominan. Hal ini didasari bahwa setiap bantuan yang diberikan selalu ada motif dan kepentingan dibaliknya. Fokus kajian ini menempatkan donor sebagai *level of analysis* (Virgianita et al., 2014). Berdasarkan sejarahnya, pemberian bantuan didominasi oleh motivasi altruisme, solidaritas, kemiskinan, kebutuhan negara penerima dan kepentingan pribadi negara donor (Riddell, 2007, 92). Namun, seiring dengan perkembangan waktu, motif dari negara donor dalam memberikan bantuannya juga terus mengalami perkembangan (Bandyopadhyay & Vermann, 2013). Untuk memahaminya secara lebih terstruktur dan tetap berada dalam ranah

hubungan internasional, tulisan ini akan membahas motif alokasi bantuan luar negeri dari tiga paradigma utama HI, realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.

Dalam studi hubungan internasional, paradigma realisme merupakan salah satu paradigma yang memiliki pengaruh. Dalam kajian terkait fenomena bantuan luar negeri, perspektif realis juga masih mendominasi perdebatan akademik. Sebagai suatu perspektif yang *state-centric*, realis memandang bantuan luar negeri sebagai kebijakan kerja sama pembangunan resmi suatu negara sebagai salah satu alat untuk mempromosikan kepentingan nasional (Virgianita et al., 2014).

Realis menganggap bantuan luar negeri sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi demi mencapai tujuan politik dan keamanan (Rosyidin, 2022), atau yang disebut oleh Baldwin (2020) dengan istilah *economic statecraft*. Menurut Baldwin, bantuan luar negeri sangat mirip dengan transaksi pertukaran komersial biasa di mana satu pihak menggunakan sumber daya ekonomi untuk membuat pihak lain mengubah perilakunya. Lancaster mengatakan bahwa realis cenderung melihat bantuan luar negeri sebagai alat diplomasi yang pragmatis dan merupakan instrumen kekuatan politik (*hard headed diplomacy*) (Baldwin, 2020). Dalam pandangan yang lebih ekstrim, realis melihat bahwa bantuan luar negeri tak lebih dari sebuah upaya propaganda dan suap (*bribes*) dari negara donor ke negara penerima bantuan.

Sedangkan, salah satu isu yang menjadi perhatian bagi liberalisme adalah isu ekonomi, yang bagi realis merupakan isu '*low politic*'. Jika kalangan realis menekankan pada isu keamanan nasional (*national security*), maka kalangan liberal menekankan pada isu kemakmuran nasional (*national prosperity*). Maka

dari itu, bantuan luar negeri dalam kacamata liberal dapat dipandang sebagai instrumen untuk meraih kemakmuran nasional (Rosyidin, 2022, 36). Bantuan luar negeri adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk meraih tujuan ekonomi.

Menurut pandangan liberal, bantuan luar negeri dimotivasi oleh kepentingan individu dan kelompok (bisnis) yang menginginkan keuntungan dari negara penerima bantuan. Kepentingan nasional negara donor adalah meningkatkan keuntungan korporasi sebagai hasil dari konsesi yang diberikan negara penerima bantuan. Keuntungan korporasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara donor sehingga perekonomian nasional ikut meningkat. Selain itu, kelompok liberal juga menganggap bahwa determinan utama bantuan luar negeri adalah kepentingan ekonomi. Tujuan pemberian bantuan ekonomi adalah mendapatkan sumber daya ekonomi, misalnya meningkatkan suplai barang yang dibutuhkan negara donor, meningkatkan ekspor barang dan jasa negara donor kepada negara penerima, dan membuka akses yang lebih luas bagi investasi bisnis di negara penerima. Singkatnya, motivasi negara memberikan bantuan luar negeri adalah mengejar keuntungan ekonomi yang menjadi kepentingan aktor-aktor domestik (Rosyidin, 2022).

Sedangkan, paradigma konstruktivisme memahami fenomena bantuan luar negeri sebagai sebuah bentuk altruisme negara di dalam dunia yang anarki (Rosyidin, 2022). Dalam bukunya yang berjudul "*Moral Vision in International Politics*", Lumsdaine (1993) menyimpulkan bahwa fenomena bantuan luar negeri tidak dapat dijelaskan atas dasar kepentingan ekonomi dan politik negara-negara donor saja sebagaimana cara pandang kaum realis dan liberalis. Lebih lanjut lagi,

ia menekankan pada keberadaan suatu visi moral yang menjadi landasan negara donor dalam memberikan bantuannya.

Secara singkat, kita dapat melihat perbedaan kontras antara tiga paradigma HI dalam melihat motif bantuan luar negeri suatu negara. Realis melihat bantuan luar negeri sebagai ‘alat’ politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional, kaum liberal menekankan pada keuntungan ekonomi, sementara konstruktivis melihat fenomena pemberian bantuan luar negeri sebagai bentuk altruisme dan kewajiban moral.

Pada tulisan ini, penulis akan melakukan analisis motif bantuan Indonesia kepada Fiji dengan menggunakan paradigma liberalisme. Liberalisme mewakili pandangan bahwa motif negara dalam memberikan bantuan luar negeri adalah karena adanya motif ekonomi. David Sogge (2002) dalam bukunya yang berjudul “*Give and Take: What’s the Matter with Foreign Aid?*” mengklasifikasikan motif ekonomi negara berdasarkan lingkup (internal dan eksternal) dan juga jangka waktunya (jangka panjang dan pendek).

Pada lingkup internal, tujuan jangka pendek dari pemberian bantuan luar negeri adalah untuk mempromosikan kepentingan sektor bisnis dan pekerjaan terkait, meningkatkan neraca pembayaran pemberi pinjaman/donor; untuk menjamin solvabilitas bank kreditur, publik atau swasta. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengkonsolidasikan dan melindungi sektor ekonomi domestik.

Dalam lingkup eksternal jangka pendek, motif ekonomi negara adalah untuk menangkap peluang pasar. Sedangkan, jangka panjangnya adalah untuk

memenangkan, memperluas, melindungi peluang perdagangan dan investasi, mendapatkan akses bahan mentah dan tenaga kerja yang murah, serta untuk membentuk dan menstabilkan peran dan hierarki ekonomi Utara-Selatan. Lebih lanjut lagi, motif ini bertujuan untuk memenangkan dan menstabilkan kepatuhan terhadap aturan ekonomi di lembaga-lembaga internasional (Sogge, 2002).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Bantuan Luar Negeri**

Dalam tulisan ini, bantuan luar negeri yang dimaksud adalah bantuan jenis ODA atau *official development assistance*. ODA sendiri didefinisikan oleh OECD sebagai bantuan resmi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara, yang bertujuan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan negara penerima. Bantuan luar negeri ini diberikan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara bagian, pemerintah pusat, dan juga lembaga internasional.

### **1.6.2 Motif Ekonomi**

Dalam tulisan ini, motif ekonomi dari pemberian bantuan luar negeri digambarkan sebagai motif yang berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang sifatnya material, antara lain; untuk menangkap peluang pasar, mempromosikan kepentingan sektor bisnis dan pekerjaan terkait, untuk memenangkan, memperluas, melindungi peluang perdagangan dan investasi, serta untuk mengkonsolidasikan dan melindungi sektor ekonomi dalam negeri (Sogge, 2002).

## **1.7 Argumen Penelitian**

Motif ekonomi dari bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji melalui LDKPI pada tahun 2020 yaitu sebagai upaya melakukan perluasan akses pasar ke Fiji sebagai pasar non tradisional serta sarana untuk mempromosikan kepentingan sektor bisnis domestik.

## **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif, tulisan ditujukan untuk dapat memahami suatu situasi atau kondisi sosial, peristiwa, ataupun interaksi tertentu (Silverman et al., 2014). Metode ini akan berusaha untuk menafsirkan dan juga memahami makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dilihat dari sudut pandang peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya, teks, video, atau audio) untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman. Creswell (2012) mendefinisikan metode kualitatif sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul; pengumpulan data; menganalisis data secara induktif, membangun dari tema khusus ke tema umum; dan membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir penelitian yang menggunakan metode ini memiliki struktur penulisan yang fleksibel.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penulis akan menjelaskan motif ekonomi dari pemberian bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji menggunakan teori motif bantuan luar negeri milik David Sogge.

### **1.8.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian akan berfokus pada hubungan Indonesia dengan Fiji, mulai dari dinamika hubungan bilateral kedua negara, kerjasama ekonomi, hingga pemberian bantuan luar negeri. Selain itu, subjek penelitian lainnya adalah Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), serta kementerian yang masih berkaitan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, serta individu lain yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri Indonesia.

### **1.8.3. Jenis Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah dokumen kualitatif, antara lain dokumen publik (misalnya, surat kabar, hasil rapat, laporan resmi) atau dokumen pribadi (misalnya, jurnal, surat, email).

### **1.8.4. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini akan bersumber dari sumber sekunder atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data ini bersumber dari *press release*, laman resmi pemerintah, dokumen, artikel jurnal, surat kabar, buku dan juga skripsi.

### **1.8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku, laporan karya ilmiah, serta tulisan lainnya yang masih relevan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui internet. Dengan teknik ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berasal dari situs resmi pemerintah, siaran pers, hasil wawancara, e-journal, serta situs-situs lainnya yang kredibel dan masih memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### **1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data**

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, penulis kemudian akan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

### **1.8.7. Kualitas Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang kredibel seperti situs resmi pemerintah, buku nasional, internasional, jurnal nasional, jurnal internasional, serta skripsi.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini akan terbagi dalam 4 bab:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi desain riset penelitian

### **Bab 2 Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Fiji**

Bab ini berisi dinamika bantuan luar negeri Indonesia dari era orde lama hingga pasca masa kini, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang LDKPI sebagai lembaga bantuan luar negeri Indonesia, dan hubungan politik Indonesia-Fiji terutama terkait sikap serta respons Fiji dalam kaitannya dengan isu kemerdekaan Papua.

### **Bab 3 Analisis Motif Bantuan Indonesia**

Bab ini berisi dinamika hubungan ekonomi Indonesia-Fiji dan analisis motif ekonomi Indonesia dalam pemberian dana bantuan luar negeri kepada Fiji

### **Bab 4 Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan juga saran bagi penelitian lebih lanjut.